

AKSES MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Aisyah Zulvitri

Email:

aisyahzulvitri01@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia**Aisyah Zulvitri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: The high number of poor people in Malang City is of course the government's obligation to provide assistance to help meet the basic needs of households in Malang City. Government assistance such as PKH and BPNT have also become assistance owned by the people of Malang City which are obtained in cash and non-cash. According to BPS, the community poverty level is measured based on the food and non-food poverty lines. However, there are still many people who are financially capable but still receive social assistance. Malang City itself has a poverty line of IDR 570,238 per capita per month per 2021. The selection of assistance provided is based on fulfilling government criteria. As the criteria to be examined are the effect of poverty, employment, place of residence and number of family members on PKH and BPNT receipts. This research was conducted with a quantitative descriptive method using binary logistic regression data analysis method. With the results of the study proving that only the variable number of family members has a significant effect on PKH acceptance. Meanwhile, none of the variables affected BPNT revenue. This can be taken into consideration in the process of providing assistance so that it is right on target.

Keywords: Beggars; Scavengers; Poverty.

Abstrak: Tingginya jumlah penduduk miskin di Kota Malang tentunya menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan bantuan guna membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga di Kota Malang. Bantuan pemerintah seperti PKH dan BPNT turut menjadi bantuan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang yang didapatkan secara tunai dan non tunai. Tingkat kemiskinan masyarakat menurut BPS diukur berdasarkan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Tetapi masih banyak masyarakat yang mampu secara finansial namun masih mendapatkan bantuan sosial. Kota Malang sendiri memiliki garis kemiskinan sebesar Rp 570.238 per kapita per bulan per tahun 2021. Seleksi bantuan yang diberikan berdasarkan pemenuhan kriteria pemerintah. Seperti kriteria yang akan diteliti adalah pengaruh dari kemiskinan, pekerjaan, tempat tinggal dan jumlah anggota keluarga terhadap penerimaan PKH dan BPNT. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif menggunakan metode analisis data regresi logistik biner. Dengan hasil penelitian membuktikan bahwa hanya variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan pada penerimaan PKH. Sedangkan tidak ada satupun variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan BPNT. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pemberian bantuan agar tepat sasaran.

Kata Kunci: Kemiskinan; PKH; BPNT.

Cite this as:

Zulvitri, A. 2023. Akses Masyarakat Miskin terhadap Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 02, Number 4, Pages 883-895. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.14>

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang hampir selalu dihadapi setiap negara di dunia. Biasanya kemiskinan menjadi topik utama permasalahan pada negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Menilik data yang diungkapkan oleh *World Population Review* dalam cnnindonesia.com (2022) bahwa Indonesia menempati urutan ke 73 dengan status negara termiskin di dunia per tahun 2020. Hal ini turut berpengaruh dengan adanya perubahan garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja terbaru mengacu pada tahun 2017 sedangkan perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja lama mengacu pada tahun 2011. Bank Dunia telah meningkatkan garis kemiskinan ekstrem yang semula US\$1,9 berubah menjadi US\$2,15 per kapita per hari. Dengan menggunakan kurs dolar AS sebesar Rp15.216, menandakan garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia setara dengan Rp32.812 per kapita per hari atau Rp984.360 per kapita per bulan. Sedangkan BPS menerjemahkan garis kemiskinan menjadi acuan pengeluaran minimum nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam satu bulan. Dengan garis kemiskinan Rp 505.469 per kapita per bulan yang tercatat oleh BPS per Maret 2022.

Sama dengan permasalahan kemiskinan di daerah lainnya, Kota Malang berada diposisi ke 32 dari 38 kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin yang dimiliki Kota Malang sebesar 40,62 ribu jiwa atau sekitar 4,62% per tahun 2021 menurut jatim.bps.go.id (2022). Jumlah penduduk miskin Kota Malang merupakan salah satu kota yang mengalami kenaikan di Jawa Timur dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu pengaruhnya adalah dengan adanya kenaikan dari pengeluaran rata-rata kesenjangan garis kemiskinan dibanding sebelumnya. Menurut data BPS dalam malangkota.bps.go.id (2022), Kota Malang memiliki garis kemiskinan sebesar Rp 570.238 per kapita per bulan per tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Malang Tahun 2021 sebesar 0,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Serta melebarnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Kota Malang yang diindikasikan dengan kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,22% per

tahun 2021. Oleh karenanya, bantuan serta dukungan pemerintah sangat berarti bagi masyarakat miskin Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang turut serta dalam memberikan program untuk mengatasi kemiskinan dengan berbagai bidang program yang diberikan. Seperti, bantuan pangan, bantuan pelatihan kerja, dan bantuan iuran kesehatan. Sudah seharusnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam bekerja sama memenuhi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera yang menyesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2009 mengenai pemenuhan hak atas dasar kebutuhan dasar warga negara dalam upaya tercapainya kesejahteraan sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin tertera dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 mengenai kebutuhan makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan sosial. Dijabarkan Kembali dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 yang dimaksud dengan kebutuhan dasar meliputi berbagai kebutuhan manusia, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, makanan, pakaian, layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta tempat tinggal dan hunian. Apabila masyarakat sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maka akan sulit pula bagi mereka untuk menaikkan status sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Oleh karenanya pemerintah memiliki program dengan harapan dapat memberantas kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial. Seperti bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuan dari PKH adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan melalui pemberian akses yang lebih baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Apabila PKH bergerak dalam bantuan tunai, BPNT memiliki peran bergerak dalam bidang non tunai. Dimana BPNT menggunakan sistem perbankan sebagai mekanisme penyaluran bantuan untuk mendukung upaya produktif masyarakat. Bantuan ini hanya diperuntukkan membeli kebutuhan bahan pangan karbohidrat dan protein seperti beras dan telur. Dengan harapan bantuan yang diberikan dapat berkontribusi dalam proses meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat dengan meningkatkan akses yang lebih meluas

terhadap layanan keuangan menurut Bappenas dalam (Gultom et al., 2020).

Dalam proses penyaluran bantuan sosial, tentunya pemerintah memiliki kriteria masyarakat penerima bantuan. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan Winarti & Yaskur (2019) memiliki hasil bahwa masih ada bantuan sosial yang diterima masyarakat dengan pendapatan diatas garis kemiskinan. Hal ini merupakan wujud kurang tepat sasaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat dengan pendapatan diatas garis kemiskinan tentunya memiliki jenis pekerjaan dengan upah yang tinggi. Selain itu, pengeluaran per kapita yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi tentunya tidak sedikit atau diatas garis kemiskinan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jacobus et al (2018) memiliki hasil bahwa aset kepemilikan termasuk tempat tinggal di dalamnya berpengaruh positif pada kemiskinan. Dimana hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa hubungan antara aset kepemilikan dengan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif.

Seperti pada tabel 1 yang memperlihatkan jumlah penerima bantuan sosial berupa PKH dan BPNT pada masyarakat miskin Kota Malang untuk 6 Kelurahan yang ada di Kota Malang pada tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Penerima PKH dan BPNT di 6 Kelurahan Kota Malang Tahun 2022

Kelurahan	Penerima PKH	Penerima BPNT
Pandanwangi	10	14
Bumiayu	7	12
Mergosono	5	10
Tlogowaru	5	9
Bareng	4	9
Ciptomulyo	5	6
Total:	36	60

Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Data diatas berasal dari 92 kepala rumah tangga di Kota Malang yang menerima bantuan sosial. Akan tetapi, dari total 92 rumah tangga yang menerima bantuan sosial, terdapat 54 rumah tangga memiliki pengeluaran per kapita di atas garis kemiskinan, dengan rata-rata pengeluaran per kapita Rp 694.357. Dengan

kata lain bahwa penyaluran bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak miskin.

Dengan masih adanya bantuan kurang tepat sasaran dan tingkat kemiskinan di Kota Malang yang cukup tinggi menyebabkan peneliti ingin mengangkat topik penelitian terkait dengan akses penerimaan bantuan sosial berupa PKH dan BPNT. Oleh karenanya peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh dari kemiskinan, pekerjaan, tempat tinggal, dan jumlah anggota keluarga terhadap akses program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Secara umum kemiskinan memiliki dua jenis yang utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar pokok minimum seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan absolut sejalan dengan pengertian kebutuhan dasar menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012. Dengan kata lain, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam hal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan yang dapat diukur melalui tingkat pengeluaran (bps.go.id, n.d.)

Selain itu, pada kemiskinan relatif menjelaskan bahwa kondisi tersebut timbul karena kebijakan pembangunan yang belum berhasil merata bagi semua kalangan masyarakat, sehingga terdapat ketimpangan dalam keadaan ekonomi dimana beberapa individu lebih miskin dibandingkan dengan yang lainnya. Kemiskinan sendiri biasanya bukan atas kehendak dari seseorang, melainkan kondisi lingkaran setan yang harus terus dihadapi setiap harinya. Seseorang dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah tingkat garis kemiskinan. Menurut BPS (2022) garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran rupiah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, termasuk kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilokalori per orang perhari, serta kebutuhan pokok non makanan. Apabila dijadikan rumus akan terlihat seperti berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dengan penjelasan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Ahli ilmu sosial di Indonesia seperti Suparlan dalam Arifin et al (2020) mengatakan kemiskinan adalah situasi dimana sekelompok orang mengalami kekurangan dalam memiliki harta benda berharga. Akibat kurangnya memiliki harta benda seseorang atau sekelompok kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Oleh karenanya, kemiskinan merupakan keadaan dimana kebutuhan dasar individu tidak terpenuhi, yang menjadi syarat penting bagi kesejahteraan mereka.

Menurut Sen dalam Yulaswati (2018) kemiskinan bukan hanya diukur melalui pendapatan saja, akan tetapi dengan hilangnya deprivasi kapabilitas atau adanya ketimpangan ekspektasi yang diperoleh. Kapabilitas dalam hal ini merupakan kebebasan seseorang dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia, salah satunya yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kapabilitas manusia untuk menjalankan fungsinya dapat menentukan apakah manusia tersebut miskin atau tidak. Hal tersebut ditentukan oleh sumber daya yang dikuasai manusia tersebut. Diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan peningkatan peran pemerintah untuk mengatasi deprivasi kapabilitas.

Sen dalam Sen Amartya (2015) mengemukakan pandangan seharusnya fokus dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kebebasan manusia. Pembangunan akan rusak apabila adanya pengabaian karena kurangnya minat pada kebebasan rakyat yang terlibat. Maka dari itu dibutuhkanlah peran pemerintah sebagai jembatan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Perspektif Sen dalam Sen (1999) juga mengatakan bahwa kemiskinan seharusnya dilihat sebagai bentuk perampasan kebutuhan dasar bukan hanya dari segi rendahnya pendapatan yang merupakan salah satu kriteria dari kemiskinan. Tidak bisa ditutupi bahwa rendahnya pendapatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan dan rendahnya pendapatan yang dimiliki menjadi alasan rendahnya kemampuan sumber daya manusia.

Pada rumusan Sen dalam Arifin et al (2020) mengarahkan pentingnya memprioritaskan pencapaian peningkatan kesejahteraan sosial dan penghargaan terhadap atas hak asasi manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai peningkatan hak asasi manusia, diperlukan adanya sarana yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, mendapatkan akses yang luas terhadap informasi dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan hak-hak yang dimiliki.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian terdahulu memiliki hasil bahwa pemberian bantuan sosial pada masyarakat dengan pendapatan rendah menolong mereka dari dalamnya jurang kemiskinan. Selain itu, pekerjaan pada penelitian terdahulu terbukti menjadi salah satu kriteria dalam proses pemberian bantuan PKH. Tempat tinggal merupakan salah satu bagian dari kepemilikan aset dan pada penelitian terdahulu didapati hasil dalam kepemilikan aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi dari penelitian tersebut tidak selaras pada teori yang mengatakan adanya pengaruh negatif pada variabel kepemilikan aset terhadap kemiskinan rumah tangga. Jumlah anggota keluarga turut memberikan peran terhadap kemiskinan.

Penelitian terdahulu memiliki hasil dimana semakin bertambahnya jumlah anggota keluarga semakin meningkatkan resiko rumah tangga menjadi lebih miskin. Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai PKH dan BPNT didapati hasil koefisien variabel PKH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Begitu pula dan pada penelitian yang sama, variabel BPNT turut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karenanya ketika PKH dan BPNT mengalami kenaikan maka kemiskinan akan ikut naik *Ceteris Paribus*. Sehingga, penelitian ini memiliki hipotesis seperti penjelasan tabel di bawah ini:

H1= Diduga Kemiskinan Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap PKH dan BPNT.

H2= Diduga Pekerjaan Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap PKH dan BPNT.

- H3= Diduga Tempat Tinggal Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap PKH dan BPNT.
- H4= Diduga Jumlah Anggota Keluarga Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap PKH dan BPNT.
- H5= Diduga Kemiskinan, Pekerjaan, Tempat Tinggal dan Jumlah Anggota Keluarga memberikan Pengaruh secara Simultan dan Signifikan Terhadap PKH dan BPNT.

Dengan sampel populasi sebanyak 92 kepala rumah tangga yang berasal dari 6 Kelurahan di Kota Malang pada tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder bersumber dari sampel DTKS Kota Malang dengan ditinjau ulang oleh Bappeda Kota Malang yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang. Dengan indikator data yang akan digunakan adalah kemiskinan, pekerjaan, tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, serta keikutsertaan rumah tangga dalam program pemerintah PKH dan BPNT. Dimana penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik biner.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tabel 2. Kriteria Penerima PKH dan BPNT di Kota Malang Tahun 2022

Kriteria Penerima Bantuan	PKH		BPNT	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
Kemiskinan < GK	39.13%	19.57%	20.65%	38.04%
Kemiskinan > GK	21.74%	19.57%	14.13%	27.17%
Tidak Bekerja	11.96%	9.78%	6.25%	15.22%
Bekerja	48.91%	29.35%	28.26%	50.00%
Atap Jenis Lainnya	27.17%	16.30%	14.13%	29.35%
Atap Jenis Genteng	33.70%	22.83%	20.65%	35.87%
Lantai Jenis Lainnya	22.83%	19.57%	13.04%	29.35%
Lantai Jenis Keramik	38.04%	19.57%	21.74%	35.87%
Dinding Jenis Lainnya	2.17%	1.09%	2.17%	1.09%
Dinding Jenis Tembok	58.70%	38.04%	32.61%	64.13%

Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Tabel 2 menjelaskan kondisi 92 rumah tangga penerima PKH dan BPNT di Kota Malang pada tahun 2022. Rumah tangga dengan tingkat kemiskinan di bawah garis kemiskinan tetapi tidak termasuk dalam kategori miskin turut serta menjadi peserta PKH dan BPNT di Kota Malang. Salah satu faktor yang bisa menjadikan rumah tangga tersebut tidak miskin adalah jumlah anggota keluarga yang sedikit. Di sisi lain, rumah tangga penerima PKH dan BPNT di Kota Malang memiliki tingkat kemiskinan di atas garis kemiskinan akan tetapi mereka masih tergolong miskin. Tipisnya perbedaan antara pengeluaran per kapita yang dimiliki dengan batas garis kemiskinan yang ditetapkan Kota Malang

turut menjadi salah satu penyebab rumah tangga tersebut miskin.

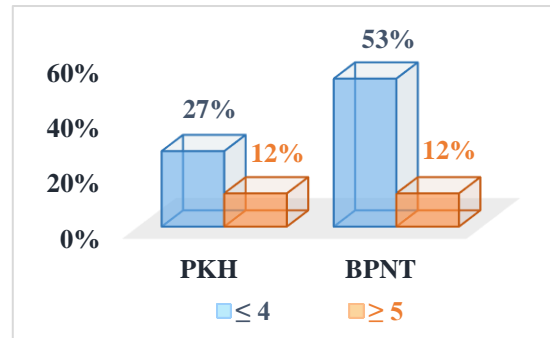
Beberapa kepala rumah tangga penerima PKH dan BPNT di Kota Malang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak miskin. Sejumlah kepala rumah tangga yang tidak bekerja dipengaruhi oleh faktor usia, memiliki jumlah anggota keluarga dalam jumlah sedikit yang menjadi beban tanggungan serta beberapa diantaranya menjadi anggota tunggal pada kartu keluarga dengan memperoleh penghasilan berdasarkan bantuan dari keluarga, lingkungan serta bantuan dari pemerintah. Jumlah penerima BPNT di Kota Malang yang tidak miskin dan tidak memiliki pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan penerima PKH di

Kota Malang, hal dikarenakan jumlah penerima BPNT secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan jumlah penerima PKH secara keseluruhan.

Berbeda dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja, kepala rumah tangga yang bekerja dan memperoleh PKH kondisi mereka masih banyak dilanda kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan dari jenis pekerjaan, jumlah pendapatan yang diperoleh dan banyaknya beban tanggungan rumah tangga tersebut. Lain hal dengan penerima BPNT di Kota Malang dan memiliki pekerjaan, setengah persen dari mereka termasuk ke dalam kategori tidak miskin. Apabila melihat dari prinsip penyaluran BPNT yang mudah untuk dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat menerima BPNT di Kota Malang. Dengan syarat utama menjadi peserta KPM adalah memiliki kondisi sosial ekonomi terendah pada daerah pelaksana sebanyak 25% populasi.

Kriteria tempat tinggal penerima PKH di Kota Malang cenderung didominasi oleh rumah tangga miskin. Baik rumah tangga yang memiliki atap rumah jenis genteng ataupun lainnya, jenis lantai rumah keramik ataupun lainnya, dan jenis dinding ataupun lainnya. Berbeda dengan rumah tangga penerima BPNT kriteria jenis tempat tinggal yang dimiliki cenderung didominasi oleh rumah tangga yang tidak miskin. Kesimpulannya adalah bahwa tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan kemiskinan dapat mempengaruhi kondisi tempat tinggal. Akan tetapi status kepemilikan tempat tinggal dapat menjadi salah satu alasan bahwa tempat tinggal mempengaruhi kemiskinan. Beberapa diantaranya tinggal di rumah dengan kondisi layak akan tetapi status kepemilikannya sebagai penyewa atau pinjaman keluarga. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya sumber daya yang dimiliki untuk membeli rumah.

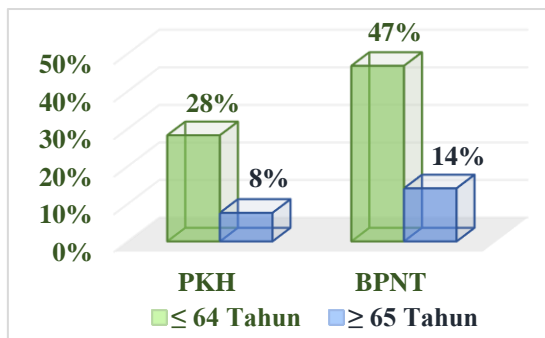
Persentase Jumlah Anggota Keluarga Penerima PKH dan BPNT di Kota Malang Tahun 2022



Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Pengelompokkan jumlah minimum anggota keluarga pada grafik diatas berdasarkan rancangan program pemerintah dalam keluarga berencana yang menyatakan 2 orang anak lebih baik. Sehingga anggota keluarga yang terhitung terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak atau 4 orang anggota keluarga. Hasil grafik menunjukkan pola yang sama pada 92 penerima PKH dan BPNT di Kota Malang, yaitu jumlah keluarga dengan anggota kurang dari atau sama dengan 4 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga lebih dari atau sama dengan 5. Seperti pada penelitian yang dilakukan Astuti (2018) bahwa rumah tangga dengan anggota rumah tangga 3-4 orang memiliki jumlah persentase yang lebih besar dibandingkan yang anggota rumah tangganya terdiri dari 5 orang atau lebih. Jumlah anggota keluarga menjadi salah satu faktor rumah tangga menjadi miskin. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, semakin bertambahnya jumlah anggota keluarga maka semakin meningkatkan tingkat kemiskinan rumah tangga tersebut. Hal ini bisa dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan beban tanggungan yang harus dipikul oleh setiap anggota keluarga.

Persentase Usia Kepala Keluarga Penerima PKH dan BPNT di Kota Malang Tahun 2022



Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Usia kepala keluarga menjadi salah satu deskripsi karakteristik responden. Karakteristik usia dikelompokkan berdasarkan taraf usia produktif menurut BPS yaitu, antara usia 15 tahun hingga 64 tahun. Dapat dilihat pada kedua grafik penerimaan bantuan di atas bahwa, 92 jumlah penerima PKH dan BPNT di Kota Malang yang memiliki usia produktif lebih banyak dibandingkan penerima dengan usia tidak produktif. Padahal usia produktif tergolong ke dalam angkatan kerja yang dapat dipungkiri untuk memiliki penghasilan. Namun, lagi-lagi hal ini juga turut disebabkan oleh minimnya pendapatan yang dimiliki sehingga tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Akan tetapi penerima dengan usia tidak produktif pada BPNT di Kota Malang lebih banyak dibandingkan dengan penerima PKH di Kota Malang. Hal ini juga turut didukung dari 92 rumah tangga penerima PKH dan BPNT di Kota Malang, 60 diantaranya merupakan penerima BPNT di Kota Malang.

Selain itu, dalam penerimaan PKH terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi, sehingga tidak semua kalangan dapat menjadi peserta PKH. Individu yang memenuhi syarat untuk menerima PKH pada aspek kesehatan adalah mereka yang memiliki ibu yang sedang hamil, dalam masa nifas, atau sedang menyusui. Dalam aspek pendidikan adalah mereka yang memiliki anak balita dengan usia 5-7 tahun yang belum memulai pendidikan di tingkat SD, keluarga yang memiliki anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan sosial

diberikan kepada lansia di atas 60 tahun dan disabilitas berat yang memerlukan bantuan orang lain untuk beraktivitas.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Analisis PKH

Hasil uji dari persamaan regresi logistik biner yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\hat{g}(x) = -2,67 + 0,27X_1 - 0,30X_2 + 0,24X_{3.1} - 0,48X_{3.2} + 1,19X_{3.3} + 0,39X_4^*$$

Keterangan: *: signifikan pada alfa = 0,05

Dengan adanya signifikansi dari variabel jumlah anggota keluarga yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel X_4 satu-satuan maka akan meningkatkan penerimaan bantuan PKH sebesar 0,39.

Pengujian signifikansi dilakukan dengan cara uji kelayakan model (GoF), uji simultan, uji parsial dan nilai rasio kecenderungan (Odds Ratio).

Tabel 3. Hasil Uji GoF dan Simultan terhadap PKH

Uji	Hosmer-Lemeshow GoF	Likelihood Ratio (Simultan)
Chi Square	12,31	7,84
Derajat Bebas	8	6
P-value	0,13	0,24

Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Hasil uji GoF Tabel 3 menggunakan nilai signifikansi chi-square adalah sebesar 12,31 lebih besar dari pada taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka, keputusannya adalah gagal tolak H_0 . Hal ini memiliki arti bahwa model yang digunakan telah sesuai dalam menjelaskan penerimaan PKH di Kota Malang.

Selanjutnya pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari semua variabel bebas dalam penelitian terhadap variabel terikat secara bersamaan dengan uji Likelihood Ratio.

Hasil uji Likelihood Ratio pada Tabel 3 memiliki hasil bahwa perolehan nilai chi-square sebesar 7,48 dengan p-value 0,24. Hal tersebut menunjukkan bahwa p-value lebih

tinggi dari signifikansi 0,05 sehingga didapati keputusan untuk gagal tolak H0.

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan melalui uji Wald yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 3. Dengan signifikansi 5 persen pada sampel yang ada maka berdasarkan tabel di bawah ini variabel jumlah anggota keluarga signifikan terhadap penerimaan PKH di Kota Malang.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (W) PKH

Nama Variabel	Kategori	Coef	p> z	Odds ratio
Kemiskinan	0= Miskin	-	-	-
	1= Tidak Miskin	0,27	0,58	1,30
Bekerja	0= Tidak Bekerja	-	-	-
	1= Bekerja	0,30	0,58	0,73
Atap Terluas	0= Lainnya	-	-	-
	1= Genteng	0,23	0,60	1,27
Lantai Terluas	0= Lainnya	-	-	-
	1= Keramik	0,48	0,30	0,61
Dinding Terluas	0= Lainnya	-	-	-
	1= Tembok	1,19	0,36	3,29
Jumlah Anggota Keluarga	Numerik	0,39	0,04*	1,47

*: Signifikan pada alfa 0,05

Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Variabel kemiskinan, bekerja, atap terluas, lantai terluas, serta dinding terluas memiliki nilai p-value > 0,05 sehingga berdasarkan pada sampel yang ada dengan taraf signifikansi 5 persen dapat dinyatakan bahwa variabel kemiskinan, bekerja, atap terluas, lantai terluas, dan dinding terluas memberikan keputusan gagal tolak H0. Hal ini

tidak sejalan seperti penelitian yang dilakukan oleh Winarti & Yaskur (2019) memiliki hasil bahwa rumah tangga dengan pengeluaran per kapita rendah memiliki dampak dalam penerimaan bantuan sosial guna meningkatkan daya beli. Selain itu, pada variabel bekerja menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Manik (2020) memiliki hasil yang signifikan bahwa pekerjaan merupakan salah satu dari kriteria proses penerimaan bantuan sosial. Akan tetapi pada variabel atap terluas, lantai terluas dan dinding terluas merupakan bagian dari tempat tinggal atau kepemilikan aset yang berdasarkan pada hasil penelitian oleh Jacobus et al (2018) bahwa aset kepemilikan tidak mempengaruhi dalam kemiskinan. Hal tersebut pun tidak sesuai dengan teori yang menyatakan terdapat pengaruh negatif dari kepemilikan aset terhadap kemiskinan dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat menurut Kuncoro dalam Jacobus et al (2018) yang menyebutkan salah satu faktor dari kemiskinan adalah rendahnya tingkat kepemilikan aset.

Diketahui nilai rasio kecenderungan yang diperoleh pada jumlah anggota keluarga penerima PKH di Kota Malang sebesar 1,47. Maka propabilitas penerimaan PKH di Kota Malang pada jumlah anggota keluarga sebesar 1,47. Hal ini juga didukung oleh masih banyaknya rumah tangga penerima PKH di Kota Malang yang tergolong miskin apabila dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kaput yang dimiliki.

Hasil Uji Analisis BPNT

Persamaan regresi logistik biner pada variabel BPNT terbentuk sebagai berikut:

$$\hat{g}(x) = -0,79 - 0,11X_1 - 0,32X_2 - 0,22X_{3.1} - 0,45X_{3.2} + 1,80X_{3.3} + 0,11X_4$$

Hasil persamaan diatas menyatakan tidak ada variabel bebas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian BPNT dilakukan dengan cara yang sama seperti variabel PKH dengan menggunakan uji GoF, uji simultan, uji parsial dan nilai rasio kecenderungan.

Tabel 5. Hasil Uji GoF dan Simultan Terhadap BPNT

Uji	Hosmer-Lemeshow GoF	Likelihood Ratio (Simultan)
Chi Square	5,88	3,11
Derajat Bebas	8	6
P-value	0,66	0,79
Uji	Hosmer-Lemeshow GoF	Likelihood Ratio (Simultan)
Chi Square	5,88	3,11
Derajat Bebas	8	6
P-value	0,66	0,79

Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Hasil uji GoF pada Tabel 5 menggunakan nilai signifikansi chi-square adalah sebesar 5,88 yang menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari pada taraf signifikansi sebesar 0,05. Sehingga memiliki keputusan untuk gagal tolak H0 yang mengartikan bahwa model yang digunakan sudah sesuai dalam menjelaskan penerimaan BPNT di Kota Malang.

Pengujian simultan dilakukan dengan menggunakan uji Likelihood Ratio dengan memiliki hasil uji seperti pada Tabel 5 bahwa nilai p-value adalah sebesar 0,79 dengan taraf signifikansi yang ada yaitu 0,05. Sehingga memiliki keputusan untuk gagal tolak H0. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang dapat mempengaruhi dalam penerimaan BPNT.

Hasil penelitian terhadap pengaruh dari variabel terikat BPNT dengan signifikansi 5 persen pada nilai p-value > 0,05 menunjukkan tidak ada satupun variabel yang mempengaruhinya. Baik dari variabel kategorik maupun dari variabel numerik memberikan keputusan gagal tolak H0. Namun, hal ini pun tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, seperti pada hasil uji parsial variabel dependen PKH. Akan tetapi jumlah anggota keluarga pada hasil uji parsial variabel dependen BPNT turut tidak memberikan hasil yang signifikan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti (2018) memiliki hasil bahwa setiap bertambahnya jumlah anggota keluarga maka akan mengakibatkan resiko miskin suatu rumah tangga menjadi naik. Tentu hal ini tidak

sejalan dengan hasil uji parsial pada variabel dependen BPNT.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (W) BPNT

Nama Variabel	Kategori	Coef	p> z	Odds ratio
Kemiskinan	0= Miskin	-	-	-
	1= Tidak Miskin	-0,11	0,81	0,88
Bekerja	0= Tidak Bekerja	-	-	-
	1= Bekerja	-0,32	0,57	0,07
Atap Terluas	0= Lainnya	-	-	-
	1= Genteng	-0,22	0,63	0,79
Lantai Terluas	0= Lainnya	-	-	-
	1= Keramik	-0,45	0,34	0,63
Dinding Terluas	0= Lainnya	-	-	-
	1= Tembok	1,80	0,17	6,09
Jumlah Anggota Keluarga	Numerik	0,11	0,54	1,12

Sumber: Bappeda Kota Malang dan DTKS Kota Malang, 2023 (diolah)

Pada hasil Tabel 6 terlihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan. Sehingga dalam hal ini variabel independen tidak bisa diinterpretasikan kedalam nilai rasio kecenderungan.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 92 rumah tangga di Kota Malang, tingkat kemiskinannya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang. Kota Malang sendiri memiliki Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan sebesar Rp 570.238 per tahun 2021. Sedangkan 54 rumah tangga dari 92 rumah tangga di Kota Malang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 694.357. Tingginya pengeluaran per kapita menandakan bahwa tinggi pula pendapatan yang diterima. Hal ini juga bisa disebabkan karena berubahnya nominal pengeluaran per kapita seiring

berjalannya waktu. Jumlah penghasilan dan jumlah anggota keluarga turut menjadi salah satu faktor penyebab besarnya pengeluaran suatu rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari 92 rumah tangga penerima PKH dan BPNT di Kota Malang tidak tergolong miskin.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang memiliki dampak bahwa kemiskinan memiliki pengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial. Seperti yang disampaikan BPS bahwa seseorang dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tidak bisa ditutupi bahwa rendahnya pendapatan turut menyumbang faktor utama kemiskinan. Diperkuat kembali oleh pandangan Sen dalam Sen (1999) bahwa kemiskinan seharusnya dilihat sebagai bentuk perampasan kebutuhan dasar bukan hanya dari segi rendahnya pendapatan yang menjadi salah satu kriteria dari kemiskinan.

Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah diharapkan dapat membantu dalam perubahan pengeluaran rumah tangga. Seperti pada pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang akan diperoleh dari PKH dan kebutuhan pangan yang diperoleh dari BPNT. Tetapi fakta dilapangan mengatakan hal yang berbeda. Bahwasanya masih banyak penerima bantuan belum bisa memanfaatkan bantuan dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya sendiri Gultom et al (2020). Oleh karenanya tidak signifikannya tingkat kemiskinan terhadap penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang menandakan bahwa tidak tepat sasaran pemberian bantuan PKH dan BPNT yang diterima masyarakat Kota Malang.

Pengaruh Pekerjaan terhadap Penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu seseorang membutuhkan biaya. Biaya dapat diperoleh karena seseorang bekerja sehingga memiliki penghasilan, dapat pula diperoleh dari bantuan sosial. Besaran penghasilan yang didapat tergantung dari keahlian atau pekerjaan yang dimiliki. Masyarakat miskin rata-rata memiliki penghasilan dengan batas rata-rata. Dengan kata lain adalah dengan kondisi pendapatan yang sedikit cenderung akan mempersulit dalam memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya. Akan tetapi hasil penelitian menyatakan bahwa pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan dalam penerimaan PKH maupun BPNT di Kota Malang. Padahal, mendapatkan bantuan sosial akan sangat membantu penerima dalam mengatasi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu, bantuan sosial yang diberikan dapat pula memutus tali kemiskinan keluarga tersebut. Seperti pada pemberian PKH yang akan membantu dalam hal kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Dari segi bahan pangan pun juga dapat dibantu dengan adanya BPNT yang memberikan pangan karbohidrat dan protein yang dapat membantu dalam penekanan pengeluaran rumah tangga penerima. Dari status pekerjaan akan diketahui bagaimana besaran pendapatan yang diterima dan juga pengeluaran per kapita yang dikeluarkan. Sehingga kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyalurkan PKH dan BPNT. Mengingat bantuan akan disalurkan pada rumah tangga dengan kondisi miskin. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Manik (2020) bahwa pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kriteria penerimaan bantuan sosial.

Pengaruh Tempat Tinggal terhadap Penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang

Tempat tinggal turut menjadi salah satu kriteria dari penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang. Akan tetapi tempat tinggal yang memiliki kriteria seperti jenis atap terluas, jenis lantai terluas dan jenis dinding terluas pada hasil penelitian tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penerimaan masyarakat terhadap PKH dan BPNT di Kota Malang. Hal ini dapat diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jacobus et al (2018) bahwa aset kepemilikan atau tempat tinggal tidak mempengaruhi dalam kemiskinan. Baik hasil penelitian atau hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan bahwa aset kepemilikan atau tempat tinggal tidak memberikan dampak yang signifikan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuncoro dalam Jacobus et al (2018) bahwa rendahnya tingkat kepemilikan aset menjadi faktor penyebab dari kemiskinan. Seperti pada karakteristik kemiskinan bahwa tempat tinggal menyangkut kepemilikan aset, keadaan sanitasi dan air bersih serta kondisi bangunan seperti kondisi atap,

lantai dan dinding turut menjadi kriteria kemiskinan.

Selain itu dalam penelitian Triani et al (2022) memiliki kesimpulan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi tempat tinggal, namun tempat tinggal tidak dapat mempengaruhi kemiskinan. Seseorang yang dengan keadaan miskin sudah sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Apabila diharuskan dalam membeli rumah yang layak tentunya akan sangat mustahil bagi seseorang dengan kondisi miskin. Oleh karenanya, banyak diantara mereka menyewa tempat tinggal dengan harga menyesuaikan kondisi keuangan dan ada pula yang harus tinggal ditempat yang bisa dikatakan tidak memadai dalam banyak hal.

Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga terhadap Penerimaan PKH dan BPNT di Kota Malang

Jumlah anggota keluarga merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan PKH di Kota Malang. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti (2018) menjelaskan bahwa setiap bertambahnya jumlah anggota keluarga maka bertambah pula tingkat kemiskinan suatu rumah tangga tersebut. Ukuran keluarga dengan jumlah anak yang lebih banyak cenderung dimiliki oleh rumah tangga miskin yang memiliki jumlah pendapatan yang terbatas. Besaran dan kondisi dari jumlah anggota keluarga turut menjadi faktor dalam pertimbangan proses penerimaan PKH pada masyarakat di 6 Kelurahan yang ada di Kota Malang. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar kecenderungan dalam memperoleh PKH di Kota Malang. Rumah tangga yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu dalam keadaan hamil, dalam masa nifas atau sedang menyusui. Lalu rumah tangga yang memiliki anak usia 5-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar juga berhak mendapatkan PKH. Serta rumah tangga yang memiliki anggota keluarga berusia diatas 60 tahun dan juga kaum disabilitas berat yang dalam kegiatan sehari-harinya membutuhkan bantuan orang lain perlu mendapatkan PKH.

Namun, pada hasil penerimaan BPNT di Kota Malang mengatakan bahwa tidak adanya signifikansi antara jumlah anggota keluarga dan juga penerimaan BPNT di Kota Malang.

Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya kurang tepat sasaran bantuan yang diberikan melihat sebanyak 60 rumah tangga dari 92 rumah tangga yang menerima BPNT di Kota Malang. Faktor terkuat yang menyebabkannya adalah mudahnya persyaratan yang dimiliki untuk menjadi peserta BPNT yang berdasarkan pada kondisi wilayah setempat. Seperti peraturan yang telah ditetapkan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 3 bahwa BPNT dapat disalurkan pada lokasi dengan kriteria terhubung dengan jaringan internet dan wilayah penerima memiliki electronic warung. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran BPNT tidak terlalu memperlihatkan bagaimana kondisi jumlah anggota keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif mampu memberikan gambaran bagaimana seharusnya kriteria masyarakat yang dapat menerima PKH dan BPNT di Kota Malang. Dalam proses penyaluran PKH dan BPNT di Kota Malang, pemerintah sudah tepat dalam mempertimbangkan kemiskinan penduduk. Dari berbagai macam kriteria yang ditetapkan pemerintah dalam penyaluran bantuan, jumlah anggota keluarga merupakan salah satu yang mempengaruhi penerimaan PKH di Kota Malang. Semakin bertambahnya jumlah anggota keluarga semakin besar pula kecenderungan atau peluang rumah tangga tersebut dalam menerima PKH di Kota Malang. Banyaknya jumlah anggota keluarga juga mengartikan bahwa semakin banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan rumah tangga. Akan tetapi, apabila rumah tangga tersebut dalam keadaan miskin maka, akan sulit bagi kepala rumah tangga untuk dapat mencukupi kebutuhan dasar setiap anggota rumah tangganya. Sehingga diperlukannya uluran pemerintah dalam membantu rumah tangga tersebut guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan memutus rantai kemiskinan yang dialami keluarga tersebut dan juga mengurangi kemiskinan wilayah setempat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memiliki beberapa saran. Untuk pemerintah, pada pendataan se-

lanjutnya sebaiknya mempertimbangkan kondisi tempat tinggal yang sebagian besar indikatornya sudah dimiliki oleh tempat tinggal pada umumnya. Selain itu kedepannya dapat mempertimbangkan kriteria penerima berdasarkan indikator yang tepat agar bantuan tertuju kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sehingga dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan sampel penelitian dan lokasi penelitian melebihi dari sampel yang digunakan peneliti saat ini agar menghasilkan berbagai macam signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Adriani Tampil, Y., Komalig, H., Langi, Y., Studi Matematika, P., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., & Sam Ratulangi Manado, U. (2017). *Analisis Regresi Logistik Untuk Menentukan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa FMIPA Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Alwi, W., Ii, E., & Husain, S. (2018). *Analisis Regresi Logistik Biner untuk Memprediksi Kepuasan Pengunjung pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene*.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*. 14(3), 1–7.
- Arifin Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, J., Sosial Gd Cawang Kencana Lt, K. R., Mayjen Sutoyo, J., & Timur, J. (2020). *Budaya Kemiskinan dalam Penganggulangan Kemiskinan di Indonesia Culture of Poverty in Poverty Reduction in Indonesia* (Vol. 6, Issue 02). Kesejahteraan Sosial.
- Astuti, E. W. (2018). Economics Development Analysis Journal. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2017). *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Banten 2016*.
- bps.go.id. (n.d.). Kemiskinan dan Ketimpangan. Bps.Go.Id. Retrieved November 4, 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- cnnindonesia.com. (2022, September 30). *RI Masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia*. Www.Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2022-0930123851-532-854651/ri-masuk-100>

